BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan wilayah yang sarat akan masalah keamanan dan konflik. Masalah keamanan dan konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara, konflik antar-negara, baik sesama negaranegara Arab, ataupun keterlibatan negara-negara non-Arab. Berbagai konflik yang berkecamuk di Timur Tengah dengan resolusi konflik yang minim, bukan hanya berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional.

Timur tengah juga merupakan suatu kawasan dimana level keamanan regional yang otonom telah beroprasi dengan kuat selama beberapa decade. *Regional Security Complex* adalah contoh jelas dari sebuah formasi konflik, begitu luas dan rumit, dan juga memiliki beberapa fitur budaya yang khas. Seperti di kebanyakan tempat lain di dunia ketiga, dimana para elit penguasa memainkan peran penting di lingkup domestik dalam membentuk dinamika keamanan secara keseluruhan. Di permukaan, wilayah ini sebagian besar terdiri dari negara-negara modern pasca kolonial. Tapi struktur ini penuh dengan unsur pramodern yang masih kuat seperti klan, suku, dan agama.

Pasca Perang Dingin, konsep keamanan bertransformasi dan menjadi sangat kompleks. Jika dahulu konsep keamanan bersifat tradisional, kini konsep keamanan bersifat non-tradisional atau kontemporer. Secara tradisional, keamanan diidentikkan dengan penggunaan kekuatan dan kapabilitas militer suatu negara untuk memunculkan suatu ancaman bagi negara lainnya. Sebaliknya, keamanan non-tradisional memposisikan dirinya kedalam isu-isu yang bersifat *low politics* sehingga tidak hanya menempatkan kekuatan militer sebagai sebuah instrumen yang dapat memberikan suatu ancaman. Selain itu, ancaman yang ditimbulkan pada keamanan non-tradisional juga bersifat multidimensi, sehingga pengaturan perbatasan nasional (*national border-setting*) dalam persepsi keamanan

tradisional tidak mampu mengenali ancaman baru yang melampaui batas-batas negara (Karacasulu, 2007). Hal ini terjadi karena potensi ancaman yang dihadapi oleh suatu negara tidak hanya didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang, tetapi juga akan dipengaruhi oleh dimensi sosial budaya, politik, bahkan identitas dan agama.

Timur Tengah merupakan kawasan dimana sebagian besar negara – negaranya masih mengalami instabilitas politik. Kecenderungan akan konflik yang masih sulit diredam di wilayah tersebut semakin menyulitkan integrasi kawasan ketika isu mengenai terorisme mencuat dan menjadikan wilayah tersebut sebagai sarang dari para teroris. Terorisme sendiri merupakan suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan melakukan kejahatan kemanusiaan dan merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara karena aksinya yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Tujuan daripada gerakan tersebut seringkali berhubungan dengan perbedaan ideologi antara kelompok tersebut dengan pemerintahan di suatu wilayah. Gerakan terorisme diidentikkan dengan gerakan dari paham islam radikal dimana mengatasnamakan jihad dalam setiap aksinya. Negara – negara di kawasan Timur Tengah yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas beragama Islam dikaitkan dengan kelompok – kelompok terorisme, hal inilah yang menjadikan kawasan luar memandang wilayah Timur Tengah sebagai sarang dari teroris.

Bagaimanapun, negara-negara Timur Tengah telah berusaha untuk bergabung dengan pasukan militer sejak Perang Dunia Kedua, salah satunya adalah Arab Saudi. Namun, tak satu pun upaya dari negara-negara ini berhasil - sekali lagi, tidak satupun dari mereka secara eksplisit berusaha untuk meminta kredensial Islam atau untuk memasukkan sebanyak mungkin anggota. Apakah Pakta Pertahanan Bersama Liga Arab, Komando Timur Tengah, Organisasi Pertahanan Timur Tengah, Pakta Baghdad (secara resmi dikenal sebagai *The East East Treaty Organization*), atau memang *Gulf Cooperation Council* (GCC), tidak ada aliansi sebelumnya yang benar-benar sesuai dengan standar keamanannya sendiri. Entah negara-negara anggota ditinggalkan karena adanya pergeseran kebijakan regional, menafsirkan 'agresi' secara fleksibel agar tidak harus datang ke

bantuan negara lain, atau menyeret kaki mereka untuk menerapkan struktur yang dijanjikan. (Gaub, 2016)

Ancaman terorisme yang terjadi di Kawasan ini secara langsung memengaruhi struktur sosial negara – negara di kawasan tersebut. Bagaimana tidak, jaringan teroris yang sebagian besar berada di negara – negara yang masih tidak stabil dalam perpolitikan, akan lebih mudah terpengaruh melalui penyebaran ide - ide dan kepercayaan yang selalu digalakkan di setiap aksinya seperti yang dilakukan oleh *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP). Kelompok teroris juga melancarkan aksinya dengan menggunakan soft tactics melalui opini publik, puisi, dan lain – lain mengenai isu sosial. Bahkan, mereka menyerukan kepada masyarakat untuk bersama – sama melakukan jihad dengan doktrin *Al-Wala' wal Bara*', dimana *Al-Wala'* yakni refleksi dari kecintaan terhadap Tuhan dan menerima kemenangan Islam dan *Al-Bara* yakni keseganan terhadap musuh – musuh Tuhan (Page et. al, 2011: 160).

Strategi yang dilakukan untuk membendung ancaman teroris ialah dengan melakukan deradikalisasi yaitu menghilangkan radikalisme. Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal atau pro kekerasan (Anon, t.t). Sedangkan Raja Arab Saudi yakni Raja Abdullah lebh menekankan tindakan pencegahan dengan Force, Reason, dan Speed. Ketiga unsur tersebut dinilai efektif untuk membendung jaringan teroris terutama pada gerakan ISIS yang mungkin akan menyerang negara besar seperti Amerika dan Eropa (Ramelan, 2014). Berbeda dengan pendapat Karmon (2006: 15-16) dengan pemahaman Islam Moderat, tren dari Islam Radikal dapat dihilangkan. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang salah paham dalam mengartikan ajaran Islam utamanya mengenai jihad. Sehingga esensi dari jihad itu sendiri disalah gunakan oleh sekelompok Islam radikal dengan melakukan tindakan kekerasan.

Pada tahun 2015 muncul sebuah kerjasama lintas negara sebagai upaya dalam pemberantasan dan penanggulangan terorisme global. Mereka mendeklarasikan diri sebagai *Islamic Millitary Alliance*, selanjutnya dapat pula

disebut sebagai Aliansi Militer Islam. Pembentukan kerjasama Aliansi Militer Islam ditujukan untuk melakukan pemberantasan terorisme secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini didasarkan kepada kondisi negara-negara muslim dalam menghadapi ancaman terorisme yang penanggulangannya masih terbatas pada masing-masing negara.

Aliansi Militer Islam sebenarnya adalah usaha ketiga Arab Saudi sejak Musim Semi Arab untuk melembagakan kerjasama dan koordinasi kelembagaan. Pada tahun 2013, diprakarsai sebuah struktur komando terpadu NATO untuk pasukan militer GCC, termasuk 100.000 tank; Pada tahun 2014, ini diikuti oleh struktur *commonpolice* (disebut GCC-Pol) dan kekuatan *commonnaval*. Proyek-proyek ini, bagaimanapun, berjalan lambat untuk saat ini.

Pemerintah Saudi menyatakan Aliansi Militer Islam akan beroperasi sejalan dengan PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan konvensi internasional lainnya. Serta akan terus berkomitmen pada ketentuan dalam Piagam PBB dan Piagam Organisasi Kerjasama Islam. Arab Saudi menegaskan adalah hak setiap negara untuk membela diri sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB dan atas dasar ketentuan konvensi OKI tentang Pemberantasan Terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya (Rash & Moran, 2015).

Terlepas dari dua pengalaman yang agak mengecewakan ini, Arab Saudi terus mencari sekutu - terutama karena menganggap dirinya berada dalam posisi bertahan meski menampilkan kemauan, dan kapasitas, untuk memproyeksikan kekuasaan. Persepsi inilah yang pada akhirnya membawa perubahan substansial dalam kebijakan luar negerinya.

Arab Saudi, yang didukung oleh Kuwait dan Bahrain, diduga tidak melihat secara langsung ke Mesir mengenai prioritas strategis: sedangkan Riyadh fokus pada Yaman, Kairo mengarahkan perhatian pada Libya, dan sementara Mesir tidak segan untuk menghidupkan kembali hubungan dengan *CHINE NOUVELLE / SIPA* Arab Saudi dan aliansi Islam oleh Florence Gaub *European Union Institute for Security Studies* (EUISS) pada bulan Februari 2016 memperangi Presiden

Suriah Assad, Arab Saudi terus mencari perubahan rezim di Damaskus. Masalah yang lebih taktis mungkin juga menjadi alasan: pada akhirnya, Riyadh mungkin tidak terlalu tertarik untuk mendanai pasukan Mesir yang bisa menyerang negara-negara Arab lainnya dengan dalih memerangi terorisme (Gaub, 2016).

Secara umum aliansi dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang datang dari pihak eksternal atau internal. Aliansi sendiri, menurut Stefan Bergsmann didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan secara eksplisit antar negara dalam kaitan keamanan nasional, dimana pihak-pihak saling berjanji saling membantu dalam bentuk sumber daya di dalam kasus-kasus tertentu (Bergsmann, 2001). Sementara itu aliansi menurut Griffiths dan Terry mendefinisikan aliansi sebagai sebuah kesepakatan antar dua negara atau lebih untuk bekerja sama dalam masalah keamanan bersama (Griffiths, O'Callaghan, and Roach (2008)).

Aliansi ini masih berada pada tahapan pengembangan dan belum merumuskan program kerja yang secara spesifik dalam kerangka kerjasamanya. Namun secara garis besar aliansi ini akan berada pada ruang lingkup militer dan keamanan, serta pada penangkalan ideologi radikal (Abdelaziz & Payne, 2015).

Lebih lanjut Muhammad bin Salman menyampaikan bahwa terorisme merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak manusia, terutama hak untuk hidup dan hak untuk mendapat keamanan. Ia melihat pada saat ini sejumlah negara, termasuk negara-negara Arab dan Afrika telah sangat menderita akibat terorisme. Oleh karenanya pemecahan masalah ini memerlukan upaya yang kuat dan kolektif. Dengan adanya aliansi ini, upaya dan koordinasi di antara negara-negara anggota untuk mengatasi terorisme akan dapat terlaksana lebih baik (Maqsood, 2016).

Berikut kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Salman pada 15 Desember 2015 :

> *"In the name of Allah, the Merciful,*
> *Praise be to Allah and peace be upon Muhammad, the messenger of Allah, Based on the Lord's guidance in the Holy Quran: (And cooperate inrighteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression), and on the teachings of the Islamic Shari'a and provisions that reject terrorism in all its forms and manifestations because it is a heinous crime and injustice rejected by all heavenly religions and human instinct.*
>
> *Since terrorism and its atrocities - which spread Shari'a-forbidden corruption and destruction in the world - constitute a serious violation of human dignity and rights, especially the right to life and the right to security, and subject the interests of countries and communities to danger and threaten their stability; and acts of corruption and terrorism cannot be justified in any way, and hence it should be fought by all means and collaboration should be made to eliminate it because this is cooperation in righteousness and piet" (Saudi Press Agency, 2015).*

Dalam kesempatan berbeda menteri luar negeri Arab Saudi Adel Al-Juberi dalam sesi wawancara dengan harian *The Sydney Morning Herald* mengatakan bahwa dalam aliansi pimpinan Arab Saudi ini, negara-negara anggota akan berbagi informasi, pelatihan, dan peralatan. Serta akan memberikan bantuan militer jika diperlukan dalam memerangi kelompok militan seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan *Al-Qaeda*. Semua kemungkinan akan diperhitungkan, bahkan jika untuk menerjunkan pasukan di lapangan. Hal ini tergantung pada permintaan yang datang, pada kebutuhan, serta kemauan negara untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Tidak ada batasan dalam meminta bantuan, jika negara membutuhkan bantuan mereka bisa datang dan meminta bantuan. Negara-negara yang dapat memberikan bantuan akan menyediakan bantuan tersebut disesuaikan pada kasus per kasus (Irish & Browning, 2015b).

Panglima dalam aliansi ini telah diputuskan oleh Arab Saudi dengan menunjuk Jenderal Raheel Sharif pada 6 Januari 2017. Jenderal Sharif merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, dimana ia pensiun pada tanggal 29 November 2016 (Boone, 2017). Dalam penunjukannya tersebut Jenderal Sharif mengajukan tiga syarat, yang kemudian juga disetujui oleh Arab Saudi. Tiga syarat tersebut yakni; Iran harus diundang dan dimasukan sebagai anggota koalisi; bekerja secara independen, tanpa perintah dan tekanan dari siapapun atau tidak ada komando lebih tinggi darinya; serta diberikan mandat sebagai mediator untuk memediasi antar negara anggota aliansi jika ada saling ketidaksepahaman (Dunyanews, 2017).

Jenderal Sharif sendiri merupakan jenderal yang dianggap cukup berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Dimana dalam masa jabatanya selama tiga tahun sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan (2013-2016), ia berhasil menurunkan serangan teroris di Pakistan hingga 70% (The Express Tribune, 2015).

Dalam perkembangannya Aliansi Militer Islam akan membantu negara-negara anggota untuk melawan terorisme dengan cara lebih baik dan terencana. Kemitraan ini akan didasarkan pada *sharing-data intelligence*, pelatihan, mempersiapkan dan memberikan dukungan militer. Aliansi ini juga akan memiliki fokus operasi bersama yang akan memfasilitasi dan memperkuat operasi militer untuk memerangi terorisme (Abbasi, 2016).

I.2 Rumusan Masalah

Melihat dari Latar Belakang Masalah di atas, tentang perkembangan ancaman Keamanan di kawasan Timur Tengah dan dengan terbentuknya Aliansi militer bentukan Arab Saudi, peneliti menentukan rumusan masalah :

"Apa Kepentingan Keamanan Arab Saudi dalam Pembentukan Aliansi Militer Islam di Kawasan Timur Tengah ?"

I.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kepentingan Arab Saudi dalam pembentukan ***Aliansi Militer Islam***, melihat semakin maraknya ancaman Terorisme di kawasan Timur Tengah, penulis ingin mengetahui apa kepentingan keamanan yang ingin di jalankan Arab Saudi dalam pembentukan aliansi tersebut.
2. Untuk menganalisis kepentingan keamanan Arab Saudi dalam pembentukan Aliansi Militer Islam terhadap ancaman Terorisme khususnya di kawasan timur tengah serta apa tujuan utama Arab Saudi membentuk Aliansi tersebut.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Praktis :

   Memberikan pemahaman mengenai Kepentingan Keamanan Arab Saudi Dalam Pembentukan Aliansi Militer Islam di Kawasan Timur Tengah.
2. Manfaat Akademis :

   Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai kepentingan Arab Saudi terkait pembentukan Aliansi Militer Islam.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis mengambil beberapa bahan sebagai referensi dan pengambilan data sebagai bahan pembanding serta analisis dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

Tinjauan pustaka Pertama, penulis mengacu terhadap jurnal ilmiah karya Brian Michael Jenkins yang berjudul ***A SAUDI-LED MILITARY ALLIANCE TO FIGHT TERRORISM.*** Jurnal ini menjelaskan tentang jawaban dari Arab Saudi prihal terbentuknya Aliansi Militer Islam dan sebuah pertanyaan tentang ide pembentukan Aliansi tersebut apakah *Good Idea* atau sebaliknya. Pembentukan Aliansi ini pada Desember tahun 2015 dengan merujuk pada isu-isu yang terjadi

di kawasan Timur Tengah. Pasca Arab Spring adalah awal kemunculan isu-isu internasional, salah satunya yang sangat mengkhawatirkan adalah isu Terorisme, terciptanya gerakan Jihadis Al-Qaeda dan ISIS mengancam kemanan negara-negara di kawasan timur tengah. Oleh karenanya, keresahan Arab Saudi prihal isu Terorisme ini pada akhirnya terciptalah Aliansi Militer Islam yang di ikuti oleh 34 negara di kawasan Timur Tengah.

Tinjauan pustaka yang kedua, adalah jurnal ilmiah karya Eddy Akpomera yang berjudul ***SAUDI ARABIA-LED ISLAMIC MILITARY ALLIANCE AGAINTS TERRORISM AND NIGERIA'S POLICY SOMERSAULT.*** Jurnal ini menjelaskan secara parsial mengenai pembentukan Aliansi Militer Islam terkait dengan isu Terorisme yang semakin berkembangnya dunia internasional, semakin mengkhawatirkan dan dapat menghancurkan keamanan bahkan kedaulatan suatu negara. Jurnal ini juga menjelaskan dengan detail mengenai sejarah terbentuknya Aliansi tersebut dan sejarah perjalanannya. Sebagai pembeda dengan penelitian ini, penulis ingin mengetahui apa kepentingan Arab Saudi di dalam Aliansi Militer Islam yang di bentuknya. Jurnal ini lebih membahas kinerja Aliansi Militer Islam di kawasan Afrika untuk pemberantasan Terorisme yang daripadanya Arab Saudi ingin menciptakan perdamaian di kawasan dan sektarnya melalui Aliansi tersebut, sementara perbedaannya dengan penelitian penulis adalah fokus terhadap kepentingan Arab Saudi di dalam pembentukan Aliansi Militer Islam ini.

Tinjauan pustaka yang ketiga, adalah jurnal ilmiah karya Ikko Tri Jayadi yang berjudul ***ALASAN INDONESIA TIDAK BERGABUNG DALAM ALIANSI MILITER ISLAM ANTI TERORISME.*** Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana dukungan Indonesia atas terbentuknya Aliansi militer Islam, namun Indonesia tidak bergabung dalam aliansi ini. Jurnal ini juga menjelaskan tentang proses terbentuknya Aliansi Militer Islam dan kaitannya dengan masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia juga turut serta dalam pembrantasan terorisme di kawasan tersebut. Jurnal yang diteliti oleh Ikko Tri Jayadi ini lebih mengacu kepada alasan Indonesia tidak tergabung dalam Aliansi Militer Islam, terlihat signifikan dengan Penelitian penulis yang ingin membahas

secara mendalam dari sisi Arab Saudi membentuk Aliansi tersebut serta apa kepentingannya.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Sekuritisasi

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sekuritisasi *(securitiation)* yang dikemukakan oleh Ole Waever. Dalam buku *On Security*, Ole Waever menyatakan bahwa: *Security* sebagai *"speech act"*. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak istimewanya untuk dapat menghentikannya (Waever, 1995). Dilanjutkan dalam buku *Security: A New Framework of Analysis*, Buzan, Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan: Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya (Barry Buzan, 1998).

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah bentuk ekstrem dari upaya politik. Setiap isu publik dapat dikategorikan dalam tiga jangkauan yang antara lain, *non-politicized* yang berarti pemerintah tidak menanggani permasalahan ini karena tidak termasuk dalam isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik. *Politicized*, yang berarti bahwa isu tersebut telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selanjutnya, *to securitized*, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman kemananan yang bersifat nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan prosedur diatas prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan (Barry Buzan, 1998).

Selanjutnya Buzan, Waever, Jaap de Wilde mengatakan: dalam melakukan analisa keamanan, pengartikulasian keamanan membutuhkan

tiga bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang antara lain terdiri dari:

- *Referent objects*: Sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak untuk menyatakan dirinya terancam.
- *Securitizing actors*: Aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu.
- *Functional actors*: Aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus bertindak sebagai referent objects atau pun securitizing actors (Barry Buzan, 1998).

Selanjutnya teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde, oleh Mely Caballero, Anthony & Ralf Emmers serta Amitav Acharya di kombinasikannya melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk mengaplikasikan serta mengoperasionalisasikan teori sekuritisasi ini melalui kerangka kerja yang terdiri dari: (Mely Caballero, 2006)

1. *Issue Area*: melihat apakah terdapat consensus bersama antar para aktor dalam menentukan *exixtential threat*.
2. *Securitizing Actors*: menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa?.
3. *Security Concept (whose security)*: konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional, NGO (Nongovernmental Organizations) melakukan sekuritisasi dengan berlandaskan human security.
4. *Process*: pengunaan *speech acts* berdampak terhadap sebuah proses sekuritisasi.
5. *Degree of Securitization*: melihat sejauhmana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indicator, antara lain *resource allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalization.*

1.6.2 *Regional Security Complex*

Regional Security Complex merupakan teori yang menekankan fokusnya pada signifikansi unsur regional atau kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional, yaitu melalui pembentukan Regional Security Complexes. Security complex tersebut didefinisikan oleh Buzan sebagai sekumpulan negara yang satu dan yang lain memiliki kedekatan, yang kemudian membuat primary security negara-negara tersebut tergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Buzan, People, States, and Fear, London: Harvester Wheatsheaf, 1991, p. 190). Definisi region atau kawasan dalam Teori Regional Security Complex lebih dilihat dari sisi keamanan hingga suatu wilayah dapat didefinisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap sebuah isu keamanan (Morgan, 1997).

Region dalam konsep ini bukanlah mengacu pada sebuah pengertian region secara teritori saja, akan tetapi lebih kepada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau bahkan keduanya sekaligus, yang memiliki interaksi satu sama lain. Dan kemudian menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain.

Analisa mengenai Regional Security Complex (RSC) ini meliputi unsur-unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Ketiga faktor ini nantinya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sistem politik, yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lain. Dan akan bermuara pada munculnya sistem pertahanan keamanan regional. Unsur yang terpenting dalam pembentukan RSC ini, menurut Barry Buzan, adalah adanya saling interdependesi dan interaksi dalam kerjasama keamanan antar negara-negara di dalam kawasan tersebut. (Buzan, The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era, 1990) Walaupun sudah terbentuk hubungan saling interdependensi dan interaksi kerjasama keamanan antar negara-negara RSC, Buzan tidak

menyangkal akan tetap adanya sebuah interaksi yang selalu terdapat suatu persaingan, perimbangan kekuasaan, berbagai bentuk aliansi dan juga masuknya kekuatan eksternal ke dalamnya.

Teori ini sangat membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dimana Aliansi Militer Islam adalah sebuah Aliansi atau gabungan dari negara-negara di kawasan untuk membrantas tindak-tanduk Terorisme serta menjawab apa kepentingan Arab Saudi dalam pembentukan Aliansi tersebut.

I.6.3 Teori Kepentingan Nasional

Menurut Hans J.Morgenthau dalam *"The Concept of Interest defined in Terms of power",* Teori Kepentingan Nasional yang didefinisikan dalam istilah *"power"* menurut Morgrnthau berada diantara nalar, akal atau *"reason"* yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri adalah setiap politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama dalam politik luar negeri dan politik internasional yang realistis atau nyata karena kepentingan nasional menentukan arah tindakan politik suatu negara.

Sedangkan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menetukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepetingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Jack C.

Plano, 1982). Hal ini mengartikan bahwa, dalam kasus keamanan, setiap negara harus mampu memenuhi kepentingan nasionalnya karena sejalan dengan politik luar negerinya.

Kepentingan nasional setiap negara pada umumnya meliputi berbagai hal seperti integritas nasional, melindungi martabat nasional Negara serta membangun kekuasaan (Carlton, 2000). Kepentingan nasional suatu Negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional, sehingga Negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas Negaranya Berdasarkan konsep kepentingan nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalahmasalah domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara mereka terhadap masyarakat internasional.

Dalam penelitian ini, dapat juga dipahami dengan menganalisa teori Kepentingan Nasional *(National Interest)* Daniel S. Papp yang menyatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti, ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, kebijakan yang di ambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan faktor kekuatan dan keamanan militer yang dinilai sebagai kepentingan nasional. Suatu kepentingan di dalam bidang militer adalah untuk menciptakan rasa aman atau terbebas dari ancaman, dimana yang terjadi di kawasan Timur Tengah, dengan berkembangnya ancaman terorisme, Arab Saudi meningkatkan kekuatan dalam aspek militer dengan membentuk Aliansi Militer Islam sebagai langkah untuk merespon ancaman yang di timbulkan.

I.6.4 Konsep Terorisme

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan konsep terorisme. Saat ini, terdapat ratusan definisi mengenai terorisme karena

memang belum ada definisi tunggal mengenai terorisme. Definisi-definisi tersebut menekankan kepada variasi atribut dari terorisme seperti karakter simbolik, dan target utama penggunaan kekerasan yang ditujukan untuk masyarakat sipil dan target non-kombatan, tujuan provokatif dan retributif dari terorisme, karakter simetrikalnya (*asymmetric character*), dll. Namun, dapat disumpulkan secara umum, terorisme merupakan sebuah instrumen untuk tujuan realisasi dari projek politik atau religi, yang secara umum berkaitan dengan penggunaan kekerasan pada demonstratif publik, diikuti dengan ancaman-ancaman yang ditujukan untuk mengintimidasi dan/ atau memaksa targetnya (Schmid, 2001: 39).

Selain itu, definisi terorisme secara singkat menurut *National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals* (NACCJSG) adalah sebuah ancaman yang menggunakan kekerasan dan penggunaan ketakutan untuk memaksa, meyakinkan, dan mendapatkan perhatian publik. Definisi tersebut kemudian dilengkapi oleh Wardlaw pada tahun 1982 dengan memasukan dimensi politik ke dalamnya, yaitu terorisme politik adalah penggunaan, atau menggunakan ancaman, kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang bertindak atau bertentangan dengan otoritas yang berlaku, ketika tindakan semacam itu dirancang untuk menciptakan kecemasan dan/ atau ketakutan yang tinggi- termasuk dampak pada sasaran kelompok yang lebih besar daripada korban langsung dengan tujuan memaksa kelompok tersebut untuk mengakses tuntutan politik pelaku (Wardlaw, 1982: 16). Sehingga dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut, terorisme mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum untuk menanamkan rasa takut, yang dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi masyarakat atau pemerintah dalam mengejar tujuan yang umumnya politik, agama, atau ideologi.

Terorisme merupakan ancaman yang lebih substantif dalam isu keamanan yang mengancam suatu negara dengan melakukan teror dan dilakukan oleh sekelompok teroris. Insiden-insiden yang dilakukan oleh

terorisme menimbulkan banyak maasalah lain dari keamanan manusia dan negara yang mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, aktor dalam terorisme ini bukan hanya dikenal dengan aktor negara (lebih lanjut akan dibahas sebagai *state or regime terrorism*) tetapi juga aktor sub-negara (*insurgent or non-state terrorism*).

Secara singkat, terorisme negara (*state or regime terrorism*) memiliki dampak yang lebih luas, baik dari segi korban langsung dan dalam mendorong terjadinya ketakutan. Terorisme negara juga menggunakan kekerasan represif terhadap korbannya, bahkan menurut Wardlaw, terorisme negara juga melakukan aksi melawan populasinya sendiri. Terorisme negara juga dikenal mendanai dan mendukung pergerakan terorisme interasional (Williams, 2008: 174). Sementara itu, terorisme non-negara (*insurgent or non-state terrorism*) dapat berasal dari dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan motivasi variabel yang mendasari. Terorisme sub-negara dibagi menjadi 2 (dua) orientasi, yaitu terorisme yang berupaya melakukan fundamental dalam keadaan atau dalam masyarakat, contohnya adalah terorisme revolusioner yang didasarkan dengan persuasi radikal dalam ideologi politiknya; dan orientasi kedua adalah bentuk terorisme yang mencari perubahan khusus untuk kelompok yang dapat diidentifikasi, contohnya adalah kelompok separatis yang memiliki elemen untuk melakukan revolusi politik (Ibid: 175).

Eskalasi ancaman potensial yang disebabkan oleh terorisme disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu insiden terorisme yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin dan serangan teroris yang lebih mematikan dan efektis sejak tahun 1990-an (Chalk, 2000: 16). Kemudian David Rapoport membagi perkembangan karakter gerakan terorisme menjadi dua yaitu, Klasik dan Modern. Selain itu juga, Rapoport membaginya ke dalam 4 (empat) gelombang terorisme modern, yaitu (1) aksi teror dengan tujuan memenangkan reformasi politik sipil dan pemerintahan otoriter; (2) aksi teror dengan tujuan untuk mewujudkan

kemerdekaan nasional; (3) aksi teror berdasarkan pada ideologi neo-marxis atau *new-left* dan kontra pada globalisasi ekonomi; dan (4) aksi teror yang didasarkan pada motivasi-motivasi religius (Rapoport, 2001: 48 - 61).

I.7 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

1. Seiring dengan berkembangnya ancaman di sektor keamanan, Arab Saudi membentuk Aliansi Militer Islam ini guna menanggulangi segala ancaman di kawasan Timur Tengah khususnya Terorisme.
2. Adanya Aliansi Militer Islam ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara negara-negara Arab dan sebagai penanda bahwa Arab Saudi masih mempunyai *power* di kawasan Timur Tengah.

I.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah model pendekatan penelitian yang mengutamakan pada kualitas data. Pertimbangan penulis dalam memilih metode penelitian kualitatif karena pendekatan ini membahas secara mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-

fenomena melalui berbagai aspek seperti opini, perilaku, sikap, tanggapan, keinginan dan kemauan dari individu seseorang ataupun kelompok. Metode ini lebih bersifat subjektif dan tidak melalui perhitungan statistik.

Creswell dalam tulisan Kadek Adi Wibawa, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia di mana pendekatan 1ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Kadek, 2016). Sedangkan menurut Moleong dalam tulisan yang dikutip oleh Anwar Hidayat, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Hidayat, 2012).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi lebih dalam mengenai apa kepentingan Arab Saudi terkait pembentukan Aliansi Militer Islam *(Islamic Military Force).*

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pola atau konsep dari pemasalahan yang ada terkait dengan penelitian yang dibahas sehingga pembaca dapat memahami tentang apa kepentingan keamanan Arab Saudi Terkait Pembentukan Aliansi Militer Islam di Kawasan Timur Tengah.

1.9.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer berupa data yang peneliti kumpulkan sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu ataupun priode tertentu.
2. Data Sekunder, data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain berupa pustaka atau buku, publikasi, artikel, jurnal, laporan tertulis, website resmi, berita *online*, dan dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan obyek yang dilakukan peneliti.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam berupa riset atau penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara dua orang, yaitu peneliti dan *informan*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian.

b) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dalam penelitian ini merujuk pada buku, jurnal ilmiah dan berita yang ditulis oleh orang lain yang sebagai bahan penulis untuk penelitiannya.

c) Teknik Pemilihan Narasumber

Teknik pemilihan narasumber dilakukan dengan dasar pertimbangan agar informasi yang didapatkan dalam proses pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan narasumber didasari berbagai pertimbangan berikut :

- Narasumber dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang membahas tentang Timur Tengah.

1.9.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan atau kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. (Cresswell, 2010). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis menurut Creswell (2010) adalah sebagai berikut :

- Mengolah data terkait dengan diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam pengambilalihan FIR. Langkah ini melibatkan transkrip ataupun rekaman suara dari narasumber terkait dengan judul penelitian ini yaitu Diplomasi Indonesia terhadap Singapura : Upaya pengembalian pengawasan udara Indonesia Flight Information Region (FIR) dari Singapura periode 2012-2016. Narasumber bersal dari beberapa kementrian bersangkutan dan beberapa ahli yang dapat menunjang data penelitian. Serta pengumpulan data forum-forum Internasional dari ICAO maupun data pertemuan bilateral Indonesia dan Singapura. Setelah itu data akan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang diplomasi Indonesia terhadap Singapura, setelah melewati proses pemahaman.
- Membaca keseluruhan data yang diperoleh terkait Diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam sengketa FIR. Bagian ini merupakan proses pemahaman terhadap data yang di dapat, agar data dapat dimaksimalkan dalam penelitian.
- Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data-data yang telah diperoleh. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi tulisan sebelum menerjemahkannya sesuai dengan pengertian penulis. Penulis akan mengklasifikasikan data

diplomasi Indonesia terhadap Singapura ataupun data penunjang untuk penyerapan informasi yang lebih optimal.

- Klasifikasi data-data akan diterapkan dengan cara sebagai berikut : Kategori pertama yaitu terkait data yang diperoleh tentang dinamika hubungan internasional. Kategori kedua yaitu terkait upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sebelumnya, serta penerapan Flight Information Region (FIR). Kategori ketiga yaitu terkait dengan penerapan strategi diplomasi terhadap Singapura. Kategori ke empat yaitu penerapan teori-teori yang akan digunakan, yaitu teori kepentingan nasional, Konsep Diplomasi, dan konsep *Flight Information Region* (FIR).
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif Di tahap ini penulis mulai menuangkan tulisan sesuai data yang diperoleh dari narasumber.
- Dan terakhir penulis mulai menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap analisis menggunakan data yang dibutuhkan dalam diplomasi Indonesia terhadap Singapura terkait pengambilalihan fungsi pengawasan udara.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

Dengan teknik analisis ini penulis akan mengembangkan teori-teori yang digunakan serta data-data yang diperoleh untuk mencari jawaban permasalahan dalam kasus Diplomasi Indonesia terhadap Singapura : Upaya pengembalian pengawasan udara Indonesia Flight Information Region (FIR) dari Singapura periode 2012-2016. Untuk memperoleh jawaban hasil-hasil upaya Indonesia yang telah dilakukan sejak 2012 hingga 2016. Agar pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

I.9.6 Prosedur Validitas

Validitas dalam data dapat diukur dari beberapalangkah dalam penelitian seperti yang disampaikan sebelumnya. Validitas tidak membawa konotasi yang sama antara penelitian kualitatif dan kuantitaif. Validitas Kualitatif berarti penulis memastikan akurasi dari penemuan data dengan menggunakan prosedur tertentu. Sedangkan, Keandalan kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan peneliti konsisten melewati berbagai macam peneliti dan projek-projek sebelumnya (Cresswell 2009).

Bentuk lain dari analisis data di kedua bentuk metode penelitian, disarankan menggunakan beberapa langkah untuk memastikan keakuratan validitas dari kedua bentuk metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Saran yang didapatkan dari diskusi tentang validitas dan seberapa jauh data dapat dipercaya diukur dari nilai dari penggunaan sebelumnya dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini (Cresswell 2009).

Selanjutnya disampaikan Cresswell dalam (Cresswell 2009) beberapa prosedur realibilitas sebagai berikut :

- Memeriksa kembali salinan data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi saat membuat salinan.
- Memastikan bahwa tidak ada gagasan yang masih belum jelas atau mengambang. Artinya tidak ada perubahan arti dalam menerjemahkan sumber. Hal ini dapat dicapai dengan dengan membandingkan data secara konstan. Dengan beberapa penulisan kembali data di memo tentang terjemahan data dan definisinya.
- Untuk penelitian berkelompok, mengkordinasikan dan berkomunikasi dengan peneliti lain berdasarkan pertemuan yang membahas dokumen dan diskusi analisi secara rutin. Untuk penelitian yang bersifat individu disarankan untuk mencari orang lain untuk memastikan kebenaran sumber yang diperoleh.

- Meng-kros cek data dari peneliti yang berbeda dengan membandingkan hasil yang dihasilkan.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ALIANSI MILITER ISLAM SEBAGAI ALAT PENANGGULANGAN TERORISME DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Pada bab ini, membahas tentang sejarah pembentukan Aliansi Militer Islam oleh Arab Saudi, apa tujuan dan fungsinya pada kawasan Timur Tengah serta bagaimana aliansi ini dapat berjalan.

BAB III KEPENTINGAN KEMANAN ARAB SAUDI DALAM PEMBENTUKAN ALIANSI MILITER ISLAM DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Bab ini merupakan analisis untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran kemampuan penulis dalam memecahkan masalah.

BAB IV PENUTUP

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian.